

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**UNIT KERJA** : BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUWITO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **818486**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.109.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m<sup>2</sup>/105 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m<sup>2</sup>/42 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m<sup>2</sup>/46 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m<sup>2</sup>/69 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 359.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **206.500.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, MISUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ----**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **1.315.500.000**



III. HUTANG

Rp. 135.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.180.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.